



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

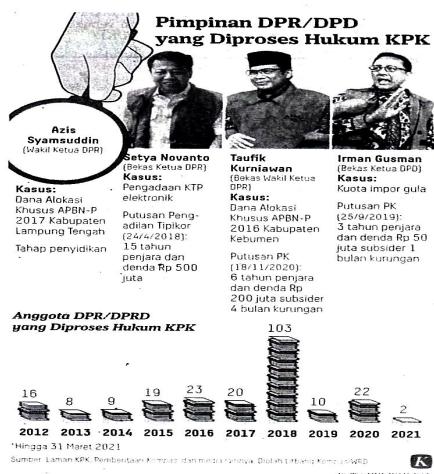
Judul : Golkar Segera Proses Penggantian Aziz
Tanggal : Sabtu, 25 September 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

Golkar Segera Proses Penggantian Azis

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara di Lampung Tengah dan menahannya. Golkar menghargai proses hukum di KPK.



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021) dini hari WIB. KPK menjemput paksas Azis karena sebelumnya dia dikabarkan tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena sedang menjalani isolasi mandiri. Berdasarkan hasil tes antigen, Azis nonreaktif Covid-19. Ia menjadi tersangka kasus korupsi pengurusan perkara di Lampung Tengah.



JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021) dini hari WIB, menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara di Lampung Tengah. Terkait hal itu, Partai Golkar segera memproses penggantian Azis dari posisi Wakil Ketua DPR.

Azis dijemput oleh penyidik KPK pada Jumat malam di rumahnya di Jakarta Selatan. Sebelum datang ke KPK, Azis terlebih dahulu menjalani tes antigen. Hasilnya nonreaktif Covid-19. Azis tiba di Gedung KPK sekitar pukul 20.10. Ia tak merespons pertanyaan wartawan dan langsung masuk ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Azis semula dijadwalkan untuk diperiksa penyidik KPK pada Jumat. Namun, ia tak hadir. Azis mengirim surat ke KPK menyatakan bahwa ia memenuhi panggilan pemeriksaan KPK karena berinteraksi dengan orang yang terinfeksi Covid-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri. Dalam surat tertanggal 23 September 2021, Azis meminta permuhan penundaan pemeriksaan menjadi tanggal 4 Oktober pagi.

>> LIHAT JUGA:

KPK Jemput Azis Syamsuddin
Penyidik KPK menjemput Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin, di rumahnya.

KOMPAS.ID

klik.kompas.id/jemputazis

vember 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Saat dihubungi, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriyana mengatakan, pada pertemuan yang dilakukan sepositif semua langkah yang dilakukan KPK terkait penyidikan kasus berkenaan dengan Azis. Golkar menghargai semangat proses hukum yang berlalui di KPK.

Penjemputan yang dilakukan KPK kepada Azis menunjukkan keterangan Azis sangat dibutuhkan KPK. Golkar berharap Azis bisa memberikan penjelasan mengenai alihnya kepada penyidik KPK. Menurut dia, pemeriksaan ini merupakan kesempatan Azis untuk memberi keterangan yang diketahui tentang pidana yang dialamatkan padanya.

Penggantian

Jika Azis ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK, lanjut Supriyana, sesuai mekanisme partai, Golkar akan melakukan penggantian posisi Azis sebagai Wakil Ketua DPR. Adapun terkait keanggotaannya sebagai kader Golkar, keputusasaan akan diambil setelah disusul yang masing-masing Azis berkekuatan hukum tetap.

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)



Golkar Segera Proses Penggantian Azis

(Sambungan dari halaman 1)

"Golkar akan melakukan rapat di bawah pimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang nantinya dibicarakan tentang proses penggantian Pak Azis di DPR jika statusnya jadi tersangka," tutur Supriansa.

Soal kemungkinan Azis diganti seandainya ia ditetapkan tersangka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hal itu akan diserahkan kepada partai politik. "Nanti kami serahkan kepada partai kalau memang ada penggantian itu," kata Dasco.

Dia mengaku baru mengetahui perkembangan kasus Azis Syamsuddin dari pemberitaan di media massa. Ia mengatakan, DPR akan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada

KPK. "Kami serahkan persoalan ini sesuai prosedur yang berlaku. Jangan berandai-andai," ujarnya.

Marwah lembaga

Dalam berkas dakwaan bekas penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju, disebutkan, sekitar Agustus 2020, Robin dimintai tolong oleh Azis Syamsuddin untuk mengamankan kasus yang melibatkan Azis dan kader Partai Golkar, Aliza Gunado, yang tengah dalam penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Robin bersama seorang lainnya, Maskur, disebut menerima uang Rp 3,099 miliar dan 36.000 dollar AS dari keduanya. Namun, Robin membantah telah menerima uang dari Azis (*Kompas*, 14/9/2021).

Pada Rabu (9/6), Azis juga

diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara dengan tersangka M Syahrial, Wali Kota (nonaktif) Tanjungbalai. Dalam berkas dakwaan Robin, Azis disebut mengenalkan Robin kepada Syahrial, sekitar Oktober 2020. Syahrial meminta bantuan pada Robin agar penyelidikan kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tak naik ke penyidikan.

Dalam kasus ini, Syahrial terbukti bersalah dan divonis dua tahun penjara. Nama Azis kembali disebutkan di berkas dakwaan Robin dalam upaya narapidana kasus korupsi bekas Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengurus asetnya yang disita KPK dan upaya hukum peninjauan kembali yang diajukannya. Sekitar Oktober

2020, Robin disebut dikenalkan kepada Rita oleh Azis.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset Politik, Badan Riset, dan Inovasi Nasional Firman Noor mengatakan, marwah dan kehormatan lembaga seperti itu tak melekat pada diri sejumlah pejabat dan petinggi negara sehingga mereka melakukan tindakan yang berpotensi mencoreng nama baik lembaga yang dipimpinnya. Terlebih lagi jika tindakan itu terkait dengan dugaan korupsi atau suap, yang selama ini menjadi musuh terbesar bangsa.

"Ini, sekali lagi, menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas mereka pada akhirnya adalah kepentingan sesaat jangka pendek, entah itu untuk individual atau kelompoknya," kata Firman. (REK/NAD/SYA)